



Pendidikan Toleransi Berbasis Etika Profetik

Noor Hayati^{1*}, Ilyas Supena²

^{1}Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, Pekalongan, Indonesia; ² Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia*

** noorhayati0008@gmail.com; ilyassupena@walisongo.ac.id*

Abstrak

Institusi pendidikan dan institusi keagamaan seharusnya menjadi tempat penyemaian benih toleransi. Namun dalam kenyataannya, banyak didapati ajaran dan ujaran kebencian yang mengarah kepada intoleransi dan radikalisme. Pada gilirannya, ia akan membahayakan stabilitas dan keutuhan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mempresentasikan formulasi pendidikan toleransi dalam perspektif etika profetik Kuntowijoyo. Artikel ini merupakan penelitian literatur dengan menggunakan pendekatan filosofis sekaligus historis dan menggunakan penafsiran sintesis, yaitu pendekatan ganda (*multiple approach*). Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode dokumentasi. Hasil dari artikel ini adalah pertama, akar dari sikap intoleran dan radikal adalah hasil dari usaha kelompok tertentu yang massif mengkampanyekan ajaran dan ujaran kebencian dengan tujuan tertentu. Kedua, perlunya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan toleransi yang sesuai dengan konteks kebhinekaan Indonesia. Ketiga, formulasi pendidikan toleransi tersebut dengan menggunakan perspektif etika profetik yang bersifat egaliter dan merupakan esensi ajaran semua agama, yaitu; humanisasi, liberasi, dan transendensi.

Kata kunci: Etika profetik, pendidikan, toleransi,

Abstract

Educational and religious institutions should be a place for seeding tolerance. But in reality, there are many hate teachings and speech that lead to intolerance and radicalism. In turn, it will endanger the stability and integrity of Indonesia. This study aims to present the formulation of tolerance education in Kuntowijoyo's prophetic ethics perspective. This article is a literature research uses philosophical as well as historical approach. This article uses multiple approach. In collecting data, the author uses the documentation method. The results of this article are first, the roots of intolerant and radical attitudes are from certain groups that massively campaign for hate teachings and speech with certain goals. Second, the need for providing comprehensive understanding of tolerance education. Third, the formulation of tolerance education uses prophetic ethical perspective. That is the essence of all religion teachings; humanization, liberation, and transcendence.

Keywords: education, tolerance, prophetic ethics

Pendahuluan

Kehidupan beragama di Indonesia mengalami problem yang serius berupa perilaku intoleran-radikal yang pada gilirannya akan memicu tindakan anarkis dan berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan negara. Belakangan ini, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD'45 kembali diuji dengan berbagai kritik yang berasal dari kelompok dengan maksud untuk mengganti Pancasila dengan khilafah Islam (daulah khilafah Islamiyah). Kelompok ini sering disebut sebagai kaum islamist (Tibi, 2012). Kehadiran kelompok islamis tersebut dianggap telah merusak sendi-sendi harmoni dan toleransi antar kelompok di masyarakat. Wataknya yang anti-pluralitas, kontra adat (tradisi lokal) dianggap tidak sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika dari Pancasila.

Aksi-aksi kelompok islamis menjadi lebih anarkis terutama jika dimanfaatkan oleh partai politik atau kaum elit tertentu (ekonom, bisnis) yang memiliki kepentingan pragmatis sehingga akan terbentuk koalisi kaum islamist, politik dan bisnis. Selama lebih dari dua dasa warsa, kelompok ini disinyalir sudah menyebarkan paham intoleran-radikal melalui institusi pendidikan (sekolah, kampus) dan institusi keagamaan (tempat ibadah). Padahal seharusnya, kedua institusi tersebut menjadi ladang persemaian benih toleransi dalam segala kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia. Kedua institusi tersebut idealnya menjadi ujung tombak dalam mentransformasikan inklusifisme di

kalangan masyarakat. Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad Saw adalah sebuah agama yang sarat akan rahmah (kasih sayang) terhadap sesama makhluk, termasuk pemeluk agama yang berbeda. Oleh karena itu, jika kemudian ada kelompok yang menyebarkan ajaran dan ujaran kebencian, maka akan bertentangan dengan ruh Islam itu sendiri. Disamping itu juga menyalahi keniscayaan Indonesia yang memiliki keragaman baik suku, agama, ras, maupun antar golongan.

Pancasila merupakan keputusan final para pendiri bangsa untuk ditetapkan sebagai dasar negara. Oleh karena itu, segala usaha yang mengarah kepada penggantiannya akan bertentangan dengan amanat di dalamnya. Namun demikian, tercatat ada usaha dari beberapa kelompok, baik sayap kanan maupun sayap kiri, yang sudah melakukan upaya, baik secara konstitusional maupun revolusioner untuk merubahnya. Tercatat ada pemberontakan G30S/PKI yang berpaham komunis/kiri berupaya merubah Pancasila dengan komunisme. Di sisi lain, pemberontakan DI/TII, pemberontakan PRRI, pemberontakan Ratu Adil, yang berhaluan kanan/fundamentalis juga berupaya merubah Pancasila dengan paham Agama (syari'at Islam).

Meski pada akhirnya, pemberontakan-pemberontakan tersebut dapat diatasi dan dihancurkan. Namun demikian, langkah tersebut tidak menjamin hilangnya akar yang terlanjur sudah menjalar, terutama paham yang berhaluan kanan fundamentalis. Indonesia masuk dalam masa Orde Baru setelah pergantian kepemimpinan dari Soekarno kepada Soeharto. Dalam masa Orde Baru, Soeharto hanya melakukan pelarangan secara tersurat kepada komunisme/kiri setelah peristiwa G30S/PKI. Larangan untuk hidup bagi komunisme tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang "Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme" yang diberlakukan mulai 1 Januari 1970. Namun sayangnya, Soeharto tidak memberlakukan sikap yang sama terhadap kelompok fundamentalis/kanan. Oleh karena itu, mereka tetap hidup di beberapa wilayah yang dahulunya merupakan basis pemberontakan. Akibatnya, setelah pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi,

kelompok ini mulai menunjukkan eksistensinya dengan menyebarkan secara massif paham intoleran-radikal melalui institusi pendidikan (sekolah dan kampus); dan institusi keagamaan (tempat ibadah).

Hasil Angket Direktorat Pendidikan Agama Islam terhadap pengurus Rohis SMA dan SMK Jawa dan Sumatera yang diedarkan pada bulan Nopember 2011 di Jakarta menunjukkan adanya indikasi berkembangnya potensi sikap intoleransi di sekolah. Hasil angket tersebut terlihat 90% dari pengurus Rohis SMA/SMK yang menjadi responden bersedia untuk berteman dengan orang yang berbeda agama di sekolah. Berarti ada sekitar 10% siswa yang memiliki potensi intoleran mengenai pertemanan ini. Terdapat 85% dari responden Rohis SMA/SMK yang bersedia bertetangga dengan orang-orang yang berbeda agama dan sisanya 15% tidak bersedia bertetangga dengan orang-orang yang berbeda agama. Angket juga menunjukkan bahwa 88% pengurus Rohis SMA/SMK menyatakan tidak bersedia untuk merusak gereja yang sudah memiliki izin pendirian, selebihnya 12% bersedia untuk merusak gereja, meskipun gereja sudah memiliki izin. Dalam hal gereja yang tidak memiliki izin, terdapat 60% dari pengurus rohis yang menjadi responden menyatakan tidak bersedia untuk merusak gereja tersebut. Tetapi sejumlah 40% bersedia merusak gereja yang tidak memiliki izin pendirian. Mengenai potensi toleransi juga terlihat pada pandangan Rohis terhadap pendirian tempat ibadah. Data yang ada menunjukkan bahwa sebanyak 63% Rohis setuju pendirian rumah ibadah kelompok agama lain di dirikan dilingkungan rumah tempat tinggal. Sedangkan 37% Rohis tidak setuju adanya pendirian gereja di lingkungan tempat tinggalnya (Tholkhah, 2002a).

Potensi sikap intoleran-radikal dapat dikurangi dengan mengajarkan pentingnya pendidikan toleransi dan multikultural yang selaras dengan sifat egaliter semua agama, juga sesuai dengan UUD'45 dan Undang Undang Sisdiknas. Salah satu upaya untuk menanamkan sikap dan perilaku toleransi dalam institusi pendidikan dan institusi keagamaan adalah dengan membudayakan dan mengkampanyekan sikap toleran terhadap perbedaan. Fungsi pendidikan agama adalah membentuk manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta mampu menjaga kedamaian hubungan inter dan antar umat beragama. Tujuan tulisan ini adalah sebagai respons atas kegelisahan penulis terhadap merebaknya ajaran dan ujaran

kebencian dalam institusi pendidikan dan institusi keagamaan. Padahal seharusnya kedua tempat tersebut bisa menjadi ujung tombak dalam mentransformasikan inklusifisme. Agar pembahasan tidak melebar, maka tulisan ini dibatasi pada: (1) mengurai akar permasalahan sikap intoleran dalam institusi pendidikan (kampus; sekolah) dan institusi keagamaan (tempat ibadah); (2) memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pendidikan toleransi; dan (3) menggagas pendidikan toleransi dalam perspektif etika profetik Kuntowijoyo.

Pendidikan Toleransi

Pendidikan toleransi berasal dari dua kata, 'pendidikan' dan 'toleransi'. Pendidikan adalah upaya menuntun anak sejak lahir untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, dalam interaksi alam beserta lingkungannya. Sehingga proses pendidikan merupakan upaya mewujudkan nilai terhadap peserta didik juga pendidik, sehingga dapat menghayati nilai-nilai tersebut agar mampu menata perilaku sebagaimana mestinya (Nurkholis, 2013).

Pada umumnya, toleransi diartikan sebagai pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada semua warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas terciptanya ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Jadi, toleransi adalah sebuah prinsip untuk berperilaku lebih baik di masyarakat sosial meskipun terdapat perbedaan kepercayaan, selama pihak lain tidak secara langsung menghalangi kesejahteraan diri sendiri atau orang lain (Erlewine, 2011). Toleransi merupakan salah satu ciri pokok masyarakat egalitarian.

Maka, maksud pendidikan toleransi dalam tulisan ini adalah suatu proses upaya penanaman dan pewujudan nilai-nilai sikap atau sifat kepada seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai suatu pengakuan hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan sikap sebagai toleransi ini harus didasari sikap kelapangan dada terhadap orang lain dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang dipegang sendiri, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip tersebut. Pendidikan toleransi terjadi karena ada perbedaan prinsip, namun

menghormati perbedaan atau prinsip orang lain tanpa mengorbankan prinsip sendiri. Jadi, pelaksanaannya hanya pada aspek-aspek yang detail dan teknis bukan dalam persoalan yang prinsip.

Pendidikan toleransi merupakan praktik terbaik yang membantu orang untuk hidup bersama dalam harmoni dan stabilitas. Mengajarkan toleransi, perdamaian, hak asasi manusia, martabat, rasa hormat, kerja sama, pemahaman, penghargaan dan nilai-nilai kemanusiaan telah menjadi salah satu kegiatan pendidikan dan pengajaran utama sistem pendidikan (Alzyoud, 2016). Ada dua penafsiran tentang konsep pendidikan toleransi. Pertama, penafsiran negatif, yang cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Kedua, penafsiran positif yaitu bahwa pendidikan toleransi tidak hanya sekedar seperti pertama (penafsiran negatif) tetapi harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain (Abdullah, 2001). Tujuan utama dari pendidikan toleransi dalam institusi pendidikan adalah untuk membantu anak didik dalam mengembangkan strategi yang akan berkontribusi untuk membangun tatanan dunia yang dapat memberikan keadilan sosial. Mereka yang memiliki toleransi tinggi cenderung bisa menerapkan ketrampilan khusus seperti berpikir kritis, membuat keputusan, interaktivitas, negosiasi, menyelesaikan konflik, membangun suasana damai, serta melindungi diri sendiri dan orang lain dari kekerasan (Sahin, 2011).

Pendidikan toleransi merupakan tantangan tersendiri dalam masyarakat yang memiliki kemajemukan suku, agama, ras, dan antar budaya (SARA), seperti Indonesia. Keberagaman ini, di samping menjadi kekayaan tak ternilai, disisi lain menjadi pemicu yang sangat potensial kepada perpecahan jika tidak disikapi secara bijaksana. Para pemerhati pendidikan sudah mengupayakan berbagai solusi guna menghindari segala kemungkinan yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan persatuan bangsa. Untuk mempelajari pendidikan toleransi, terlebih dahulu harus memahami pendidikan multikultural. Kedua jenis pendidikan ini memiliki tujuan yang sama, yakni memperkecil perbedaan dan memperbesar persamaan, sehingga diharapkan rasa memiliki negara ini menjadi perekat. Pendidikan toleransi lebih bersifat khusus pada perbedaan agama dan kepercayaan, sementara pendidikan multikultural lebih bersifat umum, yakni pada budaya (culture), yang terdiri dari suku, agama, ras, dan antar

budaya. Pendidikan toleransi mengupayakan tercapainya rasa saling memahami antar pemeluk agama yang berbeda, sebagaimana pendidikan multikultural yang berusaha menanamkan pemahaman terhadap kemajemukan budaya.

Proses untuk membangun pengertian dan pemahaman dapat dimulai dari penciptaan kohesivitas dalam bentuk transfer pengetahuan dengan cara membangun komunikasi efektif dengan individu dan kelompok yang berbeda latar belakang agama. Oleh karena itu, pendidikan menjadi penting sebagai wahana pengetahuan untuk mewujudkan kohesivitas dan inklusi sosial dalam bentuk penciptaan rasa nyaman dan tentram. Proses untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dapat ditempuh melalui jalur pendidikan dan pengajaran dalam keluarga (informal), masyarakat (nonformal), dan atau sekolah (formal). Sekolah menjadi institusi penting untuk membumikan berbagai nilai tersebut ke dalam perilaku keseharian para sivitas akademika (Jati, 2014).

Merujuk pada James A. Banks, bahwa pendidikan toleransi, yang merupakan bagian dari pendidikan multikultural, sejatinya merupakan konsep, ide, atau falsafah sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman agama/kepercayaan dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan-kesempatan pendidikan dari individu, kelompok maupun negara. Adanya rasa percaya tersebut kemudian dituangkan ke dalam kurikulum. Ada lima dimensi dalam pendidikan multikultural yakni: pertama, adanya integrasi pendidikan dalam kurikulum (content integration) yang di dalamnya melibatkan keragaman dalam satu kultur pendidikan yang bertujuan untuk menghapus prasangka. Kedua, konstruksi ilmu pengetahuan (knowledge construction) yang diwujudkan dengan mengetahui dan memahami secara komprehensif keragaman yang ada. Ketiga, pengurangan prasangka (prejudice reduction) yang lahir dari interaksi antarkeragaman dalam kultur pendidikan. Keempat, pedagogik kesetaraan manusia (equity pedagogy) yang memberi ruang dan kesempatan yang sama kepada setiap elemen yang beragam. Kelima, pemberdayaan kebudayaan sekolah (empowering school culture), yaitu bahwa sekolah adalah elemen pengentas sosial dari struktur masyarakat yang timpang ke struktur masyarakat yang berkeadilan (Banks & Banks, 2010, hal. 20–25).

Penerapan lima dimensi ini dalam pendidikan toleransi diharapkan bisa mengikis sedikit demi sedikit prasangka buruk (prejudice) yang seringkali disertai dengan penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan (stereotype). Langkah ini untuk selanjutnya menjadi sebuah keyakinan dan generalisasi meski baru pertama kali bertemu. Dalam pendidikan toleransi, institusi sekolah diharapkan bisa menjadi pemersatu (melting pot) terhadap penganut agama/kepercayaan yang berbeda, yang bisa mencairkan kebekuan dan perbedaan. Selanjutnya dalam lingkup yang lebih luas, pendidik dan peserta didik bisa mensikapi perbedaan sebagai anugerah, merekatkan persatuan berbangsa dan bernegara.

Metode

Tulisan ini merupakan penelitian literatur dengan menggunakan pendekatan filosofis sekaligus historis. Pendekatan filosofis, dimaksudkan sebagai upaya pemaknaan dan interpretasi data berdasarkan penalaran logis dari pemaparan data sebagaimana adanya. Pendekatan ini digunakan untuk data-data yang terkait dengan sikap intoleransi beragama dalam institusi pendidikan yang menuntut adanya perenungan kefilosofatan. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut, dilanjutkan dengan langkah-langkah tertentu seperti: membatasi masalah, menguji secara rasional yang berkaitan dengan kebenaran, mengenal apa yang dikatakan orang lain mengenai masalah-masalah yang bersangkutan, menyarankan suatu hipotesa, menyajikan bahan/data bukti yang dapat ditemukan dan verifikasi terhadap hasil-hasil penjabaran yang telah dilakukan. Pendekatan historis digunakan demi menyingkap, menggali, menelaah dan menganalisis persoalan-persoalan yang menjadi obyek studi melalui kaca mata kesejarahan. Maka dalam penafsirannya dipergunakan metode-metode yang sintesis, yaitu pendekatan ganda (multiple approach).

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan data yaitu mencari mengenai hal-hal yang terkait dengan topik masalah dari berbagai literatur baik buku, jurnal ilmiah maupun karya ilmiah lain dari internet yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Spalding, 1992). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan memadukan antara penalaran induktif melalui ayat

kawnyah (empiris) dan penalaran deduktif melalui ayat qowliyah (dalil), supaya ada kesatuan ilmu pengetahuan/unity of knowledge. Metode tersebut kemudian dipadukan lagi dengan metode komparasi, yaitu metode yang berusaha untuk mencapai kesimpulan dengan membandingkan apa yang kita coba untuk membuktikannya dengan sesuatu yang serupa (Nazir, 2005). Dengan demikian, diharapkan mampu menghasilkan sintesa dan melahirkan pemikiran baru dalam mengurai permasalahan, untuk selanjutnya bisa memperoleh formulasi yang tepat tentang pendidikan toleransi sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Akar Sikap Intoleransi dalam Institusi Pendidikan

Intoleran merupakan sikap yang menjadi kebalikan dari sikap toleran yang berarti tidak tenggang rasa; tidak toleran. Maka, intoleran merupakan sikap tidak saling mengizinkan dan tidak saling menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Dengan kata lain, intoleransi adalah sikap-sikap yang tidak menghargai pendirian pihak lain yang berbeda. Sikap intoleransi dapat mengarah pada perilaku kekerasan baik fisik maupun non fisik yang tidak mengenal belas kasihan, seperti melakukan pelecehan, diskriminasi, intimidasi, pengrusakan, penyerangan, pengusiran, dan pembunuhan. Sikap-sikap intoleransi ini secara teoritik dapat menjadi salah satu faktor yang dapat melahirkan konflik keagamaan. Konflik keagamaan adalah tindak kekerasan fisik atau non fisik yang melibatkan dua kelompok penganut faham keagamaan yang berbeda, dengan melibatkan simbol-simbol keagamaan. Simbol-simbol keagamaan ini dapat bersifat fisik seperti tempat ibadah, kitab suci, pakaian khas kelompok agama, atau identitas kelompok agama lain. Simbol-simbol keagamaan yang non fisik seperti pernyataan-pernyataan penganut agama, lagu-lagu atau yel-yel yang khas bermakna agama (Tholkhah, 2002b).

Sejak sebelum Indonesia merdeka, ketegangan dan bahkan konflik keagamaan sering muncul ke permukaan (Tholkhah, 2008). Seiring dengan adanya peristiwa-peristiwa yang bersifat politis untuk memperoleh kekuasaan, seperti pemilihan anggota dewan, pemilihan kepala desa, walikota, bupati, gubernur dan presiden (Tholkhah, 2001). Konflik keagamaan akan meningkat lebih cepat jika benturan antara kedua kelompok penganut agama memperoleh dukungan yang meluas dari kelompok faham

keagamaan radikal-intoleran, yakni kelompok keagamaan yang dalam menjalankan agamanya dengan cara-cara kekerasan, ekstrim, anarkis, terhadap penganut faham agama yang berbeda dengan kelompoknya (Tholkhah, 2002a). Kelompok keagamaan radikal-intoleran itu dapat berkembang di berbagai komunitas (Tholkhah, 2001) berbagai institusi, kapan saja, dari semua komunitas penganut agama (Herlina, 2005). Hal ini karena sikap-sikap yang keras dan ekstrim, sering menjadi salah satu instrumen kelompok keagamaan radikal-intoleran untuk mencapai tujuan tertentu. Di zaman peradaban global sekarang ini, berbagai varian faham keagamaan baik yang bersifat inklusif atau eksklusif, radikal atau moderat, fundamentalis atau liberal dapat secara mudah berkembang di Indonesia. Karena itu tidak mengherankan apabila dewasa ini faham keagamaan yang bersifat radikal-intoleran juga masuk dalam institusi pendidikan (sekolah, kampus), dan institusi keagamaan (khutbah di masjid, dan kajian keagamaan).

Ada berbagai faktor yang menyebabkan kelompok keagamaan radikal-intoleran muncul ke permukaan dan melahirkan konflik. Faktor-faktor tersebut mencakup faktor politik, ekonomi, psikomagic dan budaya (agama). Dasar pijakannya beragam namun ujungnya satu saja yakni kekerasan atas nama agama. Namun secara sederhana, faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua: pertama, faktor kepentingan keagamaan dan kedua, faktor kepentingan non keagamaan. Faktor kepentingan keagamaan yang sering menjadi pemicu konflik sosial bernuansa keagamaan sejak masa lalu adalah benturan misi penyiaran agama, pendirian rumah ibadah, perkawinan antar penganut agama yang berbeda, penodaan agama, penyelenggaraan hari besar agama yang tidak kondusif. Selain itu, pada setiap agama memiliki doktrin dalam kitab suci yang dipahami oleh penganutnya berbeda-beda (Tholkhah, 2002b). Dari sini, lahir aliran-aliran penganut faham keagamaan yang berbeda dalam satu agama. Tiadanya penghayatan dan pengamalan ajaran toleransi antara aliran paham keagamaan dapat saling salah menyalahkan, saling sesat menyesatkan dan saling cela-mencela bahkan saling menyerang (Tholkhah, 2004). Ada alasan dasar keyakinan akan adanya dalil/teks (pemahaman) atas agama yang membenarkan perilaku intoleran-radikal dilakukan merupakan hal yang sampai saat ini masih berlangsung dalam kekerasan agama (Qodir, 2018).

Sedangkan faktor non keagamaan yang dapat memunculkan kelompok radikal-intoleran adalah adanya benturan kepentingan ekonomi dan politik antar kelompok faham keagamaan yang berbeda (Tholkhah, 2005). Biasanya, ada sesuatu yang dibela dibelakangnya misalnya perlakuan tidak adil/diskriminatif, peminggiran politik, peminggiran budaya dan lain-lain. Kemudian kelompok ini merasa memiliki dasar ideologi yang dibela sebab dalam kenyataan yang mereka lihat adalah adanya perbagai macam ketidakadilan, kesengsaraan, kesesatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu atas kelompok lainnya sehingga mereka melawan atas nama orang lain. Kelompok ini menggunakan istilah “political representative” yang umumnya dari kelompok agama mayoritas disebuah negara. Namun juga kadang bukan dari agama mayoritas tetapi minoritas karena merasa diperlakukan secara diskriminatif (Qodir, 2018).

Pendidikan yang merupakan agen perubahan memiliki peran yang sangat strategis dalam menginternalisasikan nilai-nilai toleransi ke dalam diri peserta didik. Dalam sebuah penelitian, ditemukan hasil yang cukup menggembirakan, di mana keyakinan pada peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan berinteraksi secara positif dengan lingkungan dan teman sebayanya (Elias, 2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik sebagai model/tauladan, memberi kontribusi pada pendidikan moral anak-anak, sehingga pembentukan komunitas yang lebih peduli dapat terjadi, dan komunitas tersebut berdampak pada turunnya secara signifikan, perilaku intimidasi, dan nilai tes di sekolah juga mengalami peningkatan hampir 50 persen (Marshall, Caldwell, & Foster, 2011). Hasil menunjukkan bahwa orang tua, pendidik, dan administrator berperan penting dalam mendorong peserta didik mewujudkan nilai-nilai baik dalam kehidupan yang berkaitan dengan identitas individu yang beragam. Dorongan ini bisa dari segi format maupun substansi kerjasama dalam proses pembentukan identitas nasional. Tahap selanjutnya, akan menghasilkan penguatan secara afektif dan sikap intelektual yang mempengaruhi pengembangan sikap sosial, keterampilan sosial dan sikap spiritual (Parker, Nelson, & Burns, 2010). Kasus intoleransi menjadi masalah serius dan dapat berdampak negatif bagi berbagai kalangan jika tidak segera disadari dan dicari jalan keluarnya. Karakter toleransi menjadi faktor esensi dari perdamaian (Tillman, 2004).

Etika Profetik Sebagai Basis Pendidikan Toleransi

Kata 'etika' seringkali disebut dengan istilah ilmu akhlak. Meskipun seringkali diidentikkan, namun term etika dan akhlak sejatinya memiliki dimensi yang berbeda. Persamaan keduanya adalah sama-sama membahas baik-buruknya tingkah laku manusia. Akan tetapi akhlak lebih dekat dengan kelakuan atau budi pekerti yang bersifat aplikatif. Sedangkan etika lebih cenderung merupakan landasan filosofinya, yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk (Syukur, 2004, hal. 3). Sedangkan kata 'profetik' berasal dari kata prophet yang artinya 'nabi.' Pengertian profetik merujuk pada sosok nabi yang memiliki potensi sempurna secara fisik dan psikis. Potensi tersebut kemudian dikembangkan oleh Allah dengan bimbingan wahyu, tempaan kehidupan yang memadai, dan motivasi berkembang dengan berpikir-kontemplatif dan konkrit untuk kemajuan diri dan umatnya (Roqib, 2011). Jadi, tema profetik (kenabian) tidak hanya sarat dengan dimensi transenden, namun juga sekaligus dimensi imanen.

Gabungan 'etika' dan 'profetik' menjadi etika profetik, yang menurut Kuntowijoyo adalah etika yang ingin meniru sifat Nabi, Sang Prophet. Terinspirasi dari tulisan Roger Garaudy yang mengulas peristiwa perjalanan Isra' Mi'raj Nabi SAW., dari Masjid al Haram ke Masjid al Aqsha serta dilanjutkan menuju Sidrat al Muntaha. Menurutnya, peristiwa tersebut memberikan pelajaran kepada umat bahwa Islam sejatinya mengajarkan untuk berbaur dengan sesama manusia dan menebarkan kemaslahatan, bukan menyendiri dan asyik beribadah dengan Tuhan tanpa peduli sisi pergaulan social (Kuntowijoyo, 2006, hal. 8-9). Etika profetik memiliki misi untuk humanisasi (emansipasi), liberasi, dan transendensi (Kuntowijoyo, 1998). Misi profetik ini berpusat pada pemaknaan 'ummatan wahidatan' (universalitas umat) dan 'khoiru ummah' (umat terbaik), yang dalam pengertian obyektif maupun subyektif, adalah obyek (perhatian) politik pada level empiris sekaligus historis.

Misi profetik atau cita-cita sosio-etiknya ini kemudian bertransformasi secara nyata menjadi semangat untuk membebaskan dari belenggu kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Pembebasan dari nafsu manusia yang serakah dan nafsu kekuasaan, menuju kontinuitas kebersamaan Tuhan, mengakui keunggulan

norma mutlak atas akal manusia. Menyadari sepenuhnya bahwa sejatinya manusia hidup dalam masyarakat yang saling membutuhkan, sehingga perlu adanya rasa kesetiakawanan. Membuang jauh sifat egois, dan memelihara kasih sayang terhadap sesama, meniru sifat para nabi. Pembebasan melalui etika profetik ini dibutuhkan juga dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu ke bidang praksis berdasarkan atas nilai-nilai ilahiah/qouliyyah.

Islam memiliki prinsip tasamuh (toleran) dan prinsip ummatan wahidatan' (universalitas umat) yang mengajarkan untuk berlaku adil dan tidak membeda-bedakan terhadap agama lain. Kesadaran tersebut mengharuskan adanya persatuan dan kesatuan, bukan permusuhan. Mereka yang tidak menjadi saudara dalam iman adalah juga saudara dalam kebangsaan. Al Quran dengan konsep kerukunan hidup beragama, bukan saja terbangun oleh dasar ideologis, yakni berasaskan iman, akan tetapi juga oleh dasar humanisme. Islam memiliki doktrin pokok konvensional, yang ditafsirkan sebagai prinsip universal, yaitu Tuhan yang satu dan kemanusiaan yang satu. Sementara itu, etika profetik mengandung doktrin yang merupakan misi bersama dari semua agama: humanisasi, liberasi dan transendensi yang ditarik dari sebuah ayat amar ma'ruf, nahiy munkar, dan tu'minuna bi'llah, seperti termaktub dalam Al Quran Surat Ali Imran ayat 110. Tugas Muslim adalah bagaimana Islam harus dipahami sebagai etika profetik yang memuat tiga pilar tadi, yakni: humanisasi, liberasi, dan transendensi. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengaktualisasikan pendidikan toleransi yang berbasis etika profetik demi mewujudkan misi keuniversalan dan keegaliteran ajaran Islam dalam bingkai ke-bhinneka-an.

Humanisasi Sebagai Basis Pendidikan Toleransi

Hakikat manusia adalah pribadi yang utuh dalam koeksistensinya dengan makhluk lain dan alam semesta. Manusia juga menciptakan sejarah, yang juga berarti menciptakan peradaban dan kebudayaan. "Pendidikan sebagai humanisasi dan hominisasi yang berarti pengembangan dan perkembangan yang aktif, suatu perbuatan fundamental. Pendidikan bukanlah ide melainkan realitas." (Edisius Riyadi, 2001). Terkait etika profetik, Kuntowijoyo memakai kata humanisasi (bahasa latin humanitas) yang berarti 'makhluk manusia', 'kondisi menjadi manusia', jadi humanisasi artinya

memanusiakan manusia (Kuntowijoyo, 2001). Misi profetik Islam adalah menanamkan nilai-nilai profetik melalui pendidikan. Pendidikan toleransi sangat berperan bagi sarana pengembangan kepribadian manusia agar seluruh aspek dapat teraktualisasi dalam harmoni dan saling menyempurnakan. Setiap manusia (tanpa memandang dari suatu agama apa pun) mempunyai keunggulan, keutamaan dan keistimewaan.

Agar interaksi lebih sehat dan dinamis, maka diperlukan kesadaran bahwa setiap peserta didik mempunyai kemungkinan untuk diarahkan dan dimanfaatkan agar terjadi interaksi yang sehat. Proses tersebut tentunya dilaksanakan dengan dialogis, demokratis dan tanpa ada unsur paksaan dengan dilandasi semangat untuk menerima perbedaan (Said, 2017). Pendidikan harus mampu mengantarkan manusia menjadi merdeka batin, pikiran dan perbuatannya. Proses pendidikan yang berdimensi humanisme akan menciptakan manusia yang serba bisa. Humanisme membuat manusia sebagai tolok ukur dari segalanya, diperlakukan sebagai subyek otonom dari proses pendidikan dengan mengedepankan persahabatan, perdamaian dan solidaritas sosial yang bermuara pada kesadaran untuk toleransi dalam beragama.

Liberasi Sebagai Basis Pendidikan Toleransi

Pilar kedua etika profetik adalah liberasi, yang dalam kerangka profetik bermaksud untuk membebaskan manusia dari kekejaman kemiskinan, dominasi struktur, kekerasan dan menolak konservatisme dalam agama. Liberasi yang menjadikan agama sebagai nilai-nilai trasendental yang menjadi alat transformasi sosial sehingga agama menjadi ilmu yang objektif dan faktual. Liberasi bukan hanya dalam dataran moralitas, tetapi dilakukan secara konkret dalam realitas kemanusiaan (Kuntowijoyo, 2001). Pengertian liberasi adalah kebebasan yang diajarkan kepada peserta didik. Namun, kebebasan tersebut adalah kebebasan dengan tanpa menghilangkan atau merampas kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Kebebasan peserta didik bukan berarti melepaskan diri dari pendidik dan teman-temannya, dan hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Sebab, hal itu tidak manusiawi, tidak sportif, dan destruktif (Tabrani ZA & Masbur, 2016).

Dalam konteks pendidikan toleransi, basis liberasi berwujud penanaman nilai-nilai sikap pemberian kebebasan terhadap pemeluk agama lain dalam melaksanakan

peribadatan kepada peserta didik. Para pelaksana pendidikan, terutama pendidik, fasilitator dan pihak terkait memberikan contoh/teladan sikap dan ajaran toleran/memberikan kebebasan kepada pemeluk agama yang berbeda. Penanaman sikap toleran ini mengacu pada budaya 'tepa selira' yakni sikap yang dia berikan berdasarkan sikap yang dia harapkan. Lebih kongkretnya, ada hubungan yang harmonis antara *habl min Allah* dan *habl min annas*, bahwa ibadah kepada Tuhan akan membias kepada rasa rahmah (kasih sayang kepada sesama manusia, meskipun berbeda keyakinan).

Transendensi Sebagai Basis Pendidikan Toleransi

Transendensi merupakan alat kontrol dari kedua pilar sebelumnya: humanisasi dan liberasi/emansipasi. Selain berfungsi sebagai dasar nilai bagi praksis keduanya, ia juga berfungsi sebagai kritik. Dengan kritik transendensi, kemajuan teknik dapat diarahkan untuk mengabdikan pada perkembangan manusia dan kemanusiaan, bukan pada kehancurannya. Transendensi pada akhirnya, menjadi tolok ukur kemajuan dan kemunduran manusia dan sebagai jalan pencegah dari kehancuran di zaman modern sehingga peserta didik harus diajarkan hal-hal yang mampu mengembangkan spritualitasnya.

Pengembangan kecerdasan spritualitas dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu: pertama, menanamkan sifat sabar, jujur dan ikhlas pada peserta didik. Kedua, menyediakan lingkungan belajar yang produktif. Ketiga, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Keempat, mengembangkan sikap kasih sayang, empati, dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh peserta didik lain. Kelima, membantu peserta didik menemukan solusi terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Keenam, melibatkan peserta secara optimal dalam pembelajaran baik secara fisik, sosial maupun emosional dan spiritual. Ketujuh, merespon setiap perilaku peserta didik secara positif, dan menghindari respon yang negatif; Kedelapan, guru menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Kesembilan, guru mendisiplinkan peserta didik dengan tegas dan penuh kasih sayang (Masaong, 2011). Jadi, dalam konteks pendidikan toleransi, perspektif transendensi adalah untuk mengkritisi, mengkoreksi, sekaligus menjadi tolok ukur akhir dengan wujud sikap yang toleran terhadap pemeluk agama lain, dengan tidak menanggalkan keyakinan terhadap agama

yang dipeluknya. Hasil tertinggi dari pendidikan toleransi adalah sikap toleran itu sendiri karena didasari sikap relijiusitas yang matang. Komponen pendidikan toleransi berbasis etika profetik, pendidikan memiliki beberapa komponen seperti tujuan, pendidik-peserta didik, materi dan media-metode. Penjelasan terkait komponen-komponen ini jika digunakan dasar etika profetik yaitu tujuan pendidikan toleransi berbasis etika profetik, interaksi pendidik dan peserta didik berbasis etika profetik, kurikulum pendidikan toleransi berbasis etika profetik dan media dan metode pendidikan berbasis etika profetik.

Tujuan Pendidikan Toleransi Berbasis Etika Profetik

Quote masyhur dari Helen Keller, konselor hubungan internasional untuk American Foundation of Overseas Blind, bisa sekaligus merupakan tujuan akhir dari pendidikan toleransi adalah “tolerance is the highest result of education” (toleransi adalah hasil tertinggi dari pendidikan). Sedangkan orientasi pendidikan Islam ditekankan pada pertumbuhan yang integral antara iman, ilmu, amal, dan akhlak (Aedil & Syafar, 2013; Wardi, 2013). Kedua tujuan akhir ini selaras dengan pilar transendensi dalam etika profetik setelah tujuan pilar sebelumnya yakni humanisasi dan liberasi tercapai. Sementara kecerdasan spiritual peserta didik diindikasikan wujud sikap toleran peserta didik terhadap pemeluk agama lain.

Pendidikan yang kita harapkan adalah yang bertujuan pemanusiaan manusia Indonesia seutuhnya, yang tercerahi nilai-nilai universal, dan juga membumi Indonesia. Artinya, pendidikan harus dibangun kembali secara baru (rekonstruksi) setelah dibongkar total (dekonstruksi), dengan berpijak pada persoalan krusial bangsa ini (E Riyadi, 2001). Jadi singkatnya, hasil akhir (output) peserta didik dari pendidikan toleransi diharapkan bisa menselaraskan akhlak terhadap Tuhannya (vertikal) dengan akhlak terhadap sesama makhluk (horizontal), sekaligus akhlak terhadap lingkungannya (diagonal). Dalam konteks pendidikan toleransi, sikap ini akan membias pada sikap toleran kepada penganut agama yang berbeda.

Interaksi Pendidik dan Peserta Didik Berbasis Etika Profetik

Pendidikan toleransi berbentuk proses pengarahan perkembangan kehidupan dan keberagaman pada peserta didik ke arah idealitas kehidupan berdampingan, dengan tetap memperhatikan dan memperlakukan peserta didik sesuai dengan potensi dasar yang dimiliki serta latar belakang agama/kepercayaan masing-masing. Merubah pola pendidikan Islam indoktrinasi menjadi pola partisipatif antara guru dan murid. Pola ini memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, optimis, dinamis, inovatif, memberikan alasan-alasan yang logis, bahkan siswa dapat pula mengkritisi pendapat guru jika terdapat kesalahan. Intinya, pendekatan epistemologi ini menuntut pada guru dan siswa untuk sama-sama aktif dalam proses belajar mengajar (Sutrisno, 2011, hal. 105). Dalam praktiknya, pembelajaran toleransi tidak menjadikan murid sebagai objek pendidikan belaka, tetapi juga sebagai subjek pendidikan. Hal ini dikarenakan proses belajar mengajar disesuaikan dengan arah pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, perbedaan bukan menjadi suatu halangan bagi pendidik dan peserta didik untuk saling berinteraksi dengan mengangkat nilai-nilai universal dalam agama, seperti halnya ulas-asih terhadap sesama, tenggang rasa, dan saling menghargai satu sama lain (Jati, 2014).

Kurikulum Pendidikan Toleransi Berbasis Etika Profetik

Kurikulum institusi sekolah sebaiknya mengintegrasikan pendidikan toleransi berbasis etika profetik dalam setiap mata pelajarannya. Pilar transendensi dalam etika profetik bisa mengacu dimensi relijiusitas, yang dalam praktiknya bisa menggunakan dimensi: pertama, dimensi intelektual (religious knowledge), berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang mengenai ajaran-ajaran agama. Kedua, dimensi ritualistik (religious practice), berkaitan dengan tingkat kepatuhan seseorang dalam menjalankan ritus-ritus agama yang dianut. Ketiga, dimensi ideologis (religious belief) berkaitan dengan tingkat keyakinan seseorang mengenai kebenaran agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang fundamental atau dogmatik. Keempat, dimensi eksperiensial (religious feeling), berkaitan dengan tingkat intensitas perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman religius seseorang. Kelima, dimensi konsekuensial (religious effect) (Jati, 2014).

Pembelajaran toleransi berbasis etika profetik menitikberatkan pada bagaimana mendorong kesalehan maupun substansialisme sosial keagamaan kepada masyarakat. Salah satu contoh nyatanya adalah dengan dialog mengenai sebuah problem, kemudian para peserta didik diminta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan dari sudut pandang pengetahuan agama mereka. Dengan demikian, masing-masing peserta didik kemudian tercerahkan dengan sudut pandang yang berbeda mengenai pembahasan suatu masalah. Para peserta didik hendaknya dibiasakan untuk senantiasa bertenggang rasa dan hormat bagi yang berlainan agama. Jadi singkatnya, materi kurikulum dalam pendidikan toleransi berbasis etika profetik tidak hanya membahas hubungan antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengupas masalah manusia sebagai makhluk sosial dan relasinya dengan alam lingkungan.

Pendidikan toleransi dilakukan dalam upaya untuk menggali dan memperkaya nilai-nilai kebenaran dalam iman masing-masing peserta didik, untuk kemudian mewujudkan nilai-nilai iman tersebut. Implikasinya ialah bahwa kurikulum pendidikan toleransi harus memuat universalitas nilai yang diajarkan di setiap agama, yakni cinta kasih, kasih sayang, toleransi, tenggang rasa, saling menghargai, menghormati, dan perdamaian. Oleh karena itu, nilai ketuhanan dalam pilar transendensi (tu'minuna billah) merupakan pondasi dalam mewujudkan liberasi (emansipasi) yang melibatkan rasa yang melibatkan nilai-nilai kemanusiaan (humanisasi) yang universal. Kurikulum perlu direkonstruksi dengan menggunakan basis etika profetik yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran karena ia merupakan salah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Menghilangkan paradigma dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, ilmu tidak bebas nilai, tetapi bebas untuk dinilai.

Media dan Metode Pendidikan Berbasis Etika Profetik

Terkait pendidikan toleransi, istilah 'kapasitas linking' dan 'delinking' dari sosiolog Ignas Kleden bisa menjadi alternatif rekonstruksi kurikulum sekolah. Dalam dunia pendidikan, 'linking' berkaitan dengan kemampuan institusi pendidikan mengaitkan relevansi pembelajarannya pada kehidupan masyarakat konkret. Dalam konteks ini, sekolah mesti mengambil peran sebagai "miniatur kehidupan ideal" dan miniatur masyarakat dimana anak dipersiapkan untuk masuk dalam kehidupan

masyarakat. Institusi sekolah mestinya juga mampu melepaskan diri dari masyarakat. Ini penting terutama ketika kehidupan sosial dalam masyarakat sudah dicemari dengan permasalahan sosial seperti intoleransi, korupsi, tawuran serta berbagai masalah lainnya.

Materi yang ditawarkan dalam pendidikan toleransi berbasis etika profetik antara lain pertama, pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai keutamaan atau budi pekerti. Kedua, pendidikan yang berimplikasi pada transformasi budaya dan sosial yaitu perubahan sistem nilai, pola pikir, pola tingkah laku dan adat kebiasaan yang kontra produktif dengan humanisme. Ketiga, pendidikan yang merangsang kesadaran politik dan memuluskan demokratisasi. Keempat, pendidikan yang melahirkan profesional mandiri, berjiwa entrepreneurial (kewirausahaan). Kelima, pendidikan yang antisipatif terhadap dampak globalisasi yang di samping menyemburkan kegelisahan dan krisis multidimensional. Kiranya, masih banyak usulan-tawaran yang pantas dipertimbangkan yang selain mengembangkan budaya ilmiah, menyuburkan nilai-nilai spiritual-religius, pendidikan masa depan juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap berbagai tragedi kemanusiaan seperti penindasan, pembodohan, teror, radikalisme, keterbelakangan, dan permasalahan lingkungan (ekologi).

Simpulan

Akar sikap intoleran dalam institusi pendidikan dan keagamaan adalah kelompok intoleran-radikal yang muncul karena beberapa faktor pertama, faktor kepentingan keagamaan dan kedua, faktor kepentingan non keagamaan. Kedua, bahwa pendidikan toleransi merupakan suatu penanaman nilai-nilai untuk mewujudkan sikap atau sifat untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain yang berbeda keyakinan serta memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai realisasi terhadap pengakuan hak-hak asasi manusia. Ketiga, pendidikan toleransi berbasis pada etika profetik, yang memiliki tiga pilar yakni humanisasi, toleransi, dan transendensi yang diintegrasikan dalam komponen-komponennya: tujuan, pendidik, peserta didik, materi, dan metodenya. Sebagai catatan akhir, bahwa kosep ummatan wahidatan dan khoiru ummatin ternyata membutuhkan serangkaian reorientasi kesadaran agar penafsirannya tidak dipahami secara normatif belaka, namun lebih kepada konsep teoretis dan praksis.

Langkah ini membutuhkan sebuah obyektivikasi dan koseptualisasi agar kesadaran teologis yang selama ini salah kaprah bisa dibenahi. Oleh karena itu, reorientasi dan reinterpretasi pada saat ini sangat diperlukan untuk memberikan amunisi baru demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Beriman dan berislam sejatinya, tidak cukup hanya dibalut dengan simbol keagamaan belaka. Lebih penting dari itu adalah pengejawantahan dari kesalehan vertikal (iman kepada Allah), menuju kesalehan horizontal (saling menyayangi sesama manusia) dan diagonal (lingkungan). Perilaku terpuji sudah seharusnya merupakan implementasi dari ikrar iman. Umat Islam sudah semestinya bisa menjadi 'etalase' dari ajaran Islam yang penuh kasih bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin).

Referensi

- Abdullah, M. (2001). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Aedil, M., & Syafar, M. (2013). *Behaviour of Health Affiers in The Care of Mental Patients With Schizophreni in a Spesial Hospital in South Sulawesi Province in 2013*.
- Alzyoud, M. . (2016). The Impact of Teaching Tolerance on Students in Jordanian Schools. *Journal of Humanities and Social Sciences*, 15(1).
- Banks, J. A., & Banks, C. A. M. (2010). *Multicultural Education Issues and Perspectives*. USA: John Wiley and Sons.
- Elias, M. . (2008). *Social and Emotional Learning, Moral Education and Character Education: A Comparative Analysis and A View Toward Convergence*. New York: Routledge.
- Erlewine, R. (2011). *Monotheism and Tolerance: Recovering a Religion of Reason*. Indiana University Press.
- Herlina. (2005). *Guard the Religious Conflicts: In Strengthening National Integration*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Jati, W. R. (2014). Toleransi Beragama dalam Pendidikan Multikulturalisme Siswa SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. <http://doi.org/10.21831/cp.v1i1.1863>
- Kuntowijoyo. (1998). *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. (2001). *Muslim Tanpa Masjid*. Bandung: Mizan.
- Kuntowijoyo. (2006). *Maklumat Sastra Profetik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Meia.
- Marshall, J. C., Caldwell, S. D., & Foster, J. (2011). Moral Education the Character plus way. *Journal of Moral Education*. <http://doi.org/10.1080/03057240.2011.541770>
- Masaong, A. . (2011). *Kepemimpinan Berbasis Multiple Intelligence; Memperteguh Sinergi Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual untuk Meraih Prestasi Gemilang*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurkholis. (2013). Pendidikan dalam Upaya Memajukan Teknologi. *Jurnal Kependidikan*, 1(1).
- Parker, D. C., Nelson, J. S., & Burns, M. K. (2010). Comparison of correlates of classroom behavior problems in schools with and without a school-wide character education program. *Psychology in the Schools*. <http://doi.org/10.1002/pits.20506>
- Qodir, Z. (2018). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi*

- Pemuda*. <http://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>
- Riyadi, E. (2001). *Rekonstruksi Pendidikan Masa Depan dalam Pijar Paradigma Humanistik*. Yogyakarta.
- Riyadi, E. (2001). *Rekonstruksi Pendidikan Masa Depan dalam Pijar Paradigma Humanistik*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Roqib, M. (2011). *Prophetic Education, Kontekstualisasi Filsafat dan Budaya Profetik dalam Pendidikan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Sahin, C. (2011). Perceptions of Prespective about Tolerance Education. *Educational Research and Reviews*, 6(1).
- Said, N. (2017). Pendidikan Toleransi Beragama Untuk Humanisme Islam di Indonesia. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*. <http://doi.org/10.21043/edukasia.v12i2.2445>
- Sutrisno. (2011). *Pembaharuan Dan Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Fadilatama.
- Syukur, S. (2004). *Etika Religius*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tabrani ZA, & Masbur. (2016). Islamic Perspectives on the Existence of Soul and Its Influence in Human Learning (A Philosophical Analysis of the Classical and Modern Learning Theories). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*.
- Tholikhah, I. (2001). *Anatomi Konflik Politik di Indonesia – Belajar dari Ketegangan Politik Varian Madukoro*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Tholikhah, I. (2002a). *Gerakan Islam Klasik & Kontradiksi Faham Keagamaan*. Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Tholikhah, I. (2002b). *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Departemen Agama RI.
- Tholikhah, I. (2004). *Anatomi Konflik Politik di Indonesia-Belajar dari Ketegangan Politik Varian Madukoro*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Tholikhah, I. (2005). *Mewaspadaai Konflik Antar Umat Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Tholikhah, I. (2008). *Manusia, Agama dan Perdamaian*. Jakarta: Al Ghazali.
- Tibi, B. (2012). *Islamism and Islam*. New Haven&London: Yale University Press.
- Tillman, D. (2004). *Pendidikan Nilai untuk Kaum Muda Dewasa*. Jakarta: Grasindo.
- Wardi, M. (2013). Problematika Pendidikan Islam dan Solusi Alternatifnya (Perspektif Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis). *Tadris*, 8(1).